

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
1	PENDAPATAN - LRA	7.5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	7.5.1.1.a				
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	7.5.1.1.a.1)	35.963.880.000,00	38.286.172.724,00	106,40	33.619.377.007,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	7.5.1.1.a.2)	10.962.379.000,00	11.824.796.144,00	107,67	15.930.939.732,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	7.5.1.1.a.3)	5.738.586.000,00	4.276.625.449,00	74,52	4.711.090.062,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	7.5.1.1.a.4)	91.878.671.000,00	78.563.720.448,71	86,00	71.472.677.124,72
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA		144.083.516.000,00	132.951.314.766,71	92,29	125.734.083.926,72
8	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	7.5.1.1.b				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA					
10	Bagi Hasil Pajak - LRA	7.5.1.1.b.1)	10.920.661.000,00	11.126.704.478,00	101,89	10.110.550.637,00
11	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	7.5.1.1.b.2)	4.871.020.000,00	4.842.543.095,00	99,42	5.039.265.719,00
12	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	7.5.1.1.b.3)	588.705.480.000,00	585.092.758.000,00	99,54	649.560.018.000,00
13	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	7.5.1.1.b.4)	226.118.616.000,00	222.781.451.963,00	98,52	273.352.555.073,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA		830.615.777.000,00	824.743.457.536,00	99,29	938.071.387.426,00
15	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA					
16	Dana Penyesuaian - LRA	7.5.1.1.b.5)	31.409.880.000,00	31.409.880.000,00	100,00	65.498.274.000,00
17	Jumlah Dana Penyesuaian - LRA		31.409.880.000,00	31.409.880.000,00	100,00	65.498.274.000,00
18	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA					
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	7.5.1.1.b.6)	52.154.998.000,00	42.946.362.580,00	82,34	46.897.390.170,00
20	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA	7.5.1.1.b.7)	14.356.842.000,00	14.433.202.193,87	100,53	15.138.967.583,84
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA		66.511.840.000,00	57.379.564.773,87	86,27	62.037.357.783,84
22	Total Pendapatan Transfer - LRA		928.537.487.000,00	813.532.902.308,87	88,36	1.065.807.019.192,84
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	7.5.1.1.c				
24	Pendapatan Hibah - LRA	7.5.1.1.c.1)	69.376.215.000,00	58.074.331.612,00	83,71	35.690.697.074,00
25	Pendapatan Lainnya - LRA	7.5.1.1.c.2)	83.116.692.000,00	82.177.940.168,00	98,87	8.827.331.500,00
26	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA		152.492.907.000,00	140.252.271.780,00	91,97	44.518.028.574,00
27	JUMLAH PENDAPATAN - LRA		1.225.093.920.000,00	1.188.736.488.965,58	96,97	1.235.860.131.692,56
28						
29	BELANJA	7.5.1.2				
30	BELANJA OPERASI	7.5.1.2.a				
31	Belanja Pegawai	7.5.1.2.a.1)	506.000.000.000,00	529.228.949.604,15	99,19	509.339.372.046,00
32	Belanja Barang dan Jasa	7.5.1.2.a.2)	269.224.548.000,00	242.939.699.081,32	90,24	253.352.397.279,00
33	Belanja Bunga	7.5.1.2.a.3)	1.124.000.000,00	1.002.682.639,00	89,21	1.296.714.918,00
34	Belanja Subsidi	7.5.1.2.a.4)	0,00	0,00		0,00
35	Belanja Hibah	7.5.1.2.a.5)	47.165.194.000,00	43.424.456.200,00	92,07	54.744.622.818,00
36	Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.2.a.6)	0,00	0,00		1.592.500.000,00
37	Jumlah Belanja Operasi		863.517.244.000,00	813.595.787.521,47	96,32	820.325.607.961,00
38	BELANJA MODAL	7.5.1.2.b				
39	Belanja Modal Tanah	7.5.1.2.b.1)	3.096.525.000,00	2.653.632.800,00	85,70	2.413.571.600,00
40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.5.1.2.b.2)	28.832.290.685,00	25.884.452.130,00	89,78	28.458.776.738,00
41	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.5.1.2.b.3)	96.373.884.898,00	89.336.103.713,00	92,70	111.689.662.116,00
42	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.1.2.b.4)	119.292.628.370,00	111.822.903.367,45	93,74	113.482.438.604,86
43	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.5.1.2.b.5)	4.667.941.047,00	3.826.392.872,00	83,77	6.391.658.724,00
44	Jumlah Belanja Modal		252.163.270.000,00	233.523.484.982,45	92,61	262.448.108.782,86
45	BELANJA TAK TERDUGA	7.5.1.2.c				
46	Belanja Tak Terduga	7.5.1.2.c.1)	11.500.000.000,00	10.508.277.642,00	91,38	2.352.483.350,00
47	Jumlah Belanja Tak Terduga		11.500.000.000,00	10.508.277.642,00	91,38	2.352.483.350,00
48	JUMLAH BELANJA		1.117.180.514.000,00	1.057.827.550.145,92	94,67	1.085.124.200.093,86
49						
50	TRANSFER	7.5.1.2.d				
51	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN					
52	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	7.5.1.2.d.1)	870.014.000,00	-	-	-
53	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	7.5.1.2.d.2)	17.800.000,00	5.506.800,00	31,29	0,00
54	Jumlah Bagi Hasil Pendapatan		887.814.000,00	5.506.800,00	0,62	0,00
55	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
56	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	7.5.1.2.d.3)	125.787.325.000,00	125.615.666.278,00	99,86	137.675.053.962,00
57	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	7.5.1.2.d.4)	936.233.000,00	863.820.313,00	92,27	643.851.126,00
58	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		126.723.558.000,00	126.479.486.591,00	99,81	138.318.905.088,00
59	JUMLAH TRANSFER		127.611.172.000,00	126.484.993.391,00	99,12	138.318.905.088,00
60						
61	SURPLUS / (DEFISIT)	7.5.1.2.e	(19.697.766.000,00)	2.623.945.318,66	(13,32)	12.416.026.610,70
62						
63	PEMBIAYAAN	7.5.1.3				
64	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.1.3.a				
65	Penggunaan SILPA	7.5.1.3.a)	24.051.766.375,98	24.642.738.152,98	102,46	14.836.521.870,28
66	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		24.051.766.375,98	24.642.738.152,98	102,46	14.836.521.870,28
67	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.5.1.3.b				
68	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	7.5.1.3.b.1)	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	100,00	919.000.000,00
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	7.5.1.3.b.2)	2.554.000.375,98	2.274.086.498,00	89,04	2.274.086.498,00
70	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		4.354.000.375,98	4.074.086.498,00	93,57	3.193.086.498,00
71						
72	PEMBIAYAAN NETTO		19.697.766.000,00	20.568.651.654,98	104,42	11.643.435.372,28
73						
74	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	7.5.1.4		23.192.596.873,64		24.059.461.862,86
75	KOREKSI SILPA	7.5.1.5		(54.532.260,00)		
76	SILPA SETELAH KOREKSI	7.5.1.5		23.138.064.723,64		

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas laporan keuangan

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, dan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 44.B/LHP/XIX.MKS/05/2020 tanggal 27 Mei 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Makassar, Mei 2021

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Wahyu Priyono, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA (A)
Register Negara Akuntan, No. 718